

Sikap pengusaha korea terhadap infrastruktur hukum ekonomi di Indonesia / Cheon-Ho, Lee

Cheon-Ho, Lee, author

Deskripsi Lengkap: <http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20440580&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, keinginan ini tidak didukung oleh tersedianya sumber-sumber dana dari dalam negeri, mengingat Indonesia masih dihadapkan pada situasi, yang disebut dengan istilah "lingkaran kemiskinan." Dalam mendapatkan dana tersebut, pemerintah Indonesia telah banyak menerbitkan kebijakankebijakan serta mengeluarkan hukum-hukum ekonomi. Salah satu penyebabnya dalam mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi adalah semakin banyaknya pesaing yang menawarkan berbagai kemudahan dan insentif yang lebih menarik terhadap para penanam modal asing daripada Indonesia, misalnya negara Vietnam dan Cina. Disisi lain kebijaksanaan investasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia kurang menarik bagi penanaman modal asing. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah Indoensia telah mempermudah prosedur penanaman modal, memberikan berbagai fasilitas dan insentif serta menetapkan peraturan-peraturan yang mendukung bagi terciptanya iklim investasi yang lebih baik.

Tetapi di dalam pikiran penulis timbul pertanyaan apakah kebijakan-kebijakan pemerintah Indoneia selama ini sudah memadai untuk menyedot modal asing atau tidak. Begitupula penulis sebagai seorang warganegara Korea terdorong untuk meneliti bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia itu terlihat di kaca mata pengusaha Korea, dan apa keluhan mereka sebagai salah satu investor asing terhadap infrastruktur hukum ekonomi Indonesia.

Menurut penelitian Penulis, kenyataannya investor Korea tidak begitu tertarik, bahkan tidak peduli terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah. Perhatian utama mereka adalah jaminan keamanan terhadap investasi mereka. Sikap mereka terhadap kebijakan pemerintah sangat ragu-ragu, sebab kebijakan itu seringkali berubah-ubah dan bertolak belakang.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus memiliki strategi yang berbeda dalam mengundang investor dari Korea. Pendekatan hukum semata tidak akan memberi output seperti halnya pengusaha dari dunia Barat.